



**Laporan Bulanan Sekretariat Utama**  
**Bulan April**  
**2025**

## KATA PENGANTAR

Akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu penting karena bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga pemerintah mengimplementasikan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Aplikasi SAKIP ini digunakan untuk mengobservasi dan menilai kinerja suatu instansi pemerintah. Badan Pangan Nasional menggunakan aplikasi SAKIP sebagai bentuk komitmen Badan Pangan Nasional kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta dapat mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil atas setiap rupiah dari anggaran yang dipergunakan. Sekretariat Utama yang bertugas mendukung manajemen Badan Pangan Nasional wajib mengisi aplikasi SAKIP. Pengisian aplikasi SAKIP ini dilakukan secara bertahap dimulai dengan aktualisasi program atau kegiatan di Sekretariat Utama di sepanjang tahun 2025. Tahap berikutnya menyusun Laporan Bulanan Sekretariat Utama yang berisi aktualisasi dari aktivitas, program dan kegiatan yang terjadi di Badan Pangan Nasional. Laporan ini disusun secara bulanan sehingga pelaporan kegiatan atau program yang sudah berlangsung di bulan itu. Selain itu, bahan dan data yang dipakai pada aplikasi SAKIP ini menggunakan instrumen penilaian yang berpatokan dengan implementasi dan realisasi kegiatan atau program yang dilaksanakan. Hasil dari dokumen ini dapat digunakan sebagai referensi untuk laporan bulan berikutnya. Sekretariat utama mendapatkan alokasi berdasarkan aturan alokasi dalam BA 125 milik Badan Pangan Nasional dan uraian alokasi untuk Program Dukungan Manajemen serta diprioritaskan untuk pembayaran honor dan operasional kantor. Pemantauan atas penggunaan alokasi yang aturan dalam bulan April tahun 2025 harus tetap terlaksana agar efisien dan efektif. Kami berharap laporan ini bisa berguna untuk seluruh pihak dan sebagai referensi buat pemugaran aplikasi aktivitas kedepan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat kami harapkan pada rangka menyajikan laporan.

Jakarta, April 2025



**Sarwo Edhy**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vi
<b>BAB I: Pendahuluan</b> .....	1
<b>1.1 Latar belakang</b> .....	2
<b>1.2 Tujuan</b> .....	4
<b>1.3 Metodologi Penyusunan Laporan</b> .....	4
<b>BAB II: Rencana Kerja Output</b> .....	5
<b>BAB III: Pelaksanaan Kegiatan</b> .....	8
<b>3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan</b> .....	9
<b>4.1 Kesimpulan</b> .....	30
<b>4.3 Rekomendasi</b> .....	30

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan April 2025 Sesuai DIPA Revisi ke-6 Tanggal 28 April 2025.....</b>	<b>6</b>
<b>Tabel 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan April Tahun 2025 Per Output dan Komponen Lingkup Sekretariat Utama .....</b>	<b>9</b>
<b>Tabel 3. Realisasi Keuangan Bulan April Tahun 2025 Per Kegiatan Lingkup Badan Pangan Nasional .....</b>	<b>11</b>

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1. Realisasi dan Target Sekretariat Utama Tahun 2025 ..... 11**

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1. DIPA Revisi 6 – 28 April 2025.....</b>	<b>31</b>
<b>Lampiran 2. Realisasi Sekretariat Utama Bulan 2025.....</b>	<b>32</b>

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar belakang**

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan untuk masyarakat. Hal ini tergambar dari Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 yang menyatakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan yang dipercaya masyarakat perlu mengatur akan kebijakan terhadap pangan. Pemerintah mengatur tentang kebijakan pangan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dijelaskan tentang tugas, susunan badan, dan tata kelola dari Badan Pangan Nasional.

Fungsi yang diutamakan untuk Badan Pangan Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 adalah koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan. Oleh sebab itu, Badan Pangan Nasional berfokus untuk mengatur kebijakan di bidang pangan. Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan BUMN di bidang pangan dalam mengerjakan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah, Badan Pangan Nasional berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola sistem pangan nasional yang transparan, akuntabel, loyal dan berkelanjutan serta berkoordinasi dengan instansi-instansi lain baik itu kementerian-kementerian lain maupun universitas-universitas untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan sebagaimana visi Badan Pangan Nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022.

Pada tahun 2025 Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu:

- 1 Pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- 2 Pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi;
- 3 Pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- 4 Dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional.

Sekretariat Utama

Laporan bulanan dibuat Badan Pangan Nasional secara periodik sebagai bentuk implementasi instansi negara yang bertanggung jawab atas anggaran yang digunakan untuk membantu masyarakat. Laporan ini digunakan sebagai salah satu instrumen dalam pemantauan, jejak program atau kegiatan yang telah terlaksana dan evaluasi yang menggambarkan pencapaian dan bentuk realisasi terhadap target kinerja organisasi dalam periode bulanan. Pemantauan dan evaluasi menjadi penting untuk memastikan pencapaian target dapat berjalan sesuai yang ditetapkan, mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan sebagai upaya untuk mengantisipasi atau mengidentifikasi permasalahan yang akan timbul di periode mendatang.

Hasil atas peninjauan dan evaluasi serta bentuk pertanggungjawaban atas pemanfaatan dan pendayagunaan anggaran kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional pada bulan April 2025

dituangkan dalam bentuk laporan peninjauan dan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat Utama bulan April 2025. Laporan ini sebagai catatan dokumentasi realisasi fisik dan keuangan selama bulan April 2025 serta hasil evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan output lingkup Sekretariat Utama tahun 2025 baik fisik maupun keuangan. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan dan merepresentasikan program-program dan kegiatan-kegiatan di lingkup Sekretariat Utama di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Sekretariat Utama pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

### **1.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan laporan, diantaranya:

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Sekretariat Utama periode bulan April 2025.
2. Melakukan pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan berdasarkan target periode bulan April 2025.

### **1.3 Metodologi Penyusunan Laporan**

Metodologi penyusunan laporan meliputi:

1. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian program, kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) dari Unit Kerja Eselon (UKE) 1 dan UKE 2 dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.

**BAB II**  
**RENCANA KINERJA OUTPUT**

Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja pada Sekretariat Utama selama tahun 2025. Rencana kinerja output pada bulan April 2025 akan dilihat dari dukungan pencapaian Rincian Output (RO) dan komponen sebagaimana target sesuai lembar III DIPA Revisi ke-6 pada bulan April 2025. Pada dokumen tersebut pada bulan April ditargetkan sebesar 5,67% Target tersebut sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan April 2025 Sesuai DIPA Revisi ke-6**

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen		Alokasi Tahun 2025		Target April th. 2025	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan 5,67% (Rp)	Fisik
<b>WA-Program Dukungan Manajemen</b>		<b>108,854,211,000</b>		<b>6.172.887.764</b>	-
<b>6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional</b>					
AEC-Kerja sama	Kerja Sama Bidang Pangan	824,972,000		46.790.927	
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	325,011,000		18.442.124	
	Layanan Hukum	686,492,000		38.947.096	
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2,373,720,000		134.565.824	
	Layanan Protokoler	580,600,000		32.942.020	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,070,261,000		60.682.810	
	Layanan Umum	7,844,720,000		444.784.724	
	Layanan Perkantoran	78,698,135,000		4.463.129.045	
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	1,314,054,000		74.540.865	

.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	1,887,686,000		106.998.886	
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5,329,682,000		302.197.979	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	771,904,000		43.770.857	
	Layanan Manajemen Keuangan	1,094,046,000		62.072.410	
	Layanan Audit Internal	2,327,594,000		131.965.660	
PAD-Peraturan Presiden	Rperpres tentang Rencana Pangan Nasional	270,775,000		15.352.893	
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pangan	3,232,560,000		183.279.552	
UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	221,999,000		12.579.093	

**BAB III**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

### 3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari 53 output/RO dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 193,157,991,000,-** untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Realisasi keuangan pada bulan April Tahun 2025 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan disajikan per belanja dan per kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional sebagaimana tabel 2 dan tabel 3 berikut:

**Tabel 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan April Tahun 2025 Per Output dan Komponen Lingkup Sekretariat Utama**

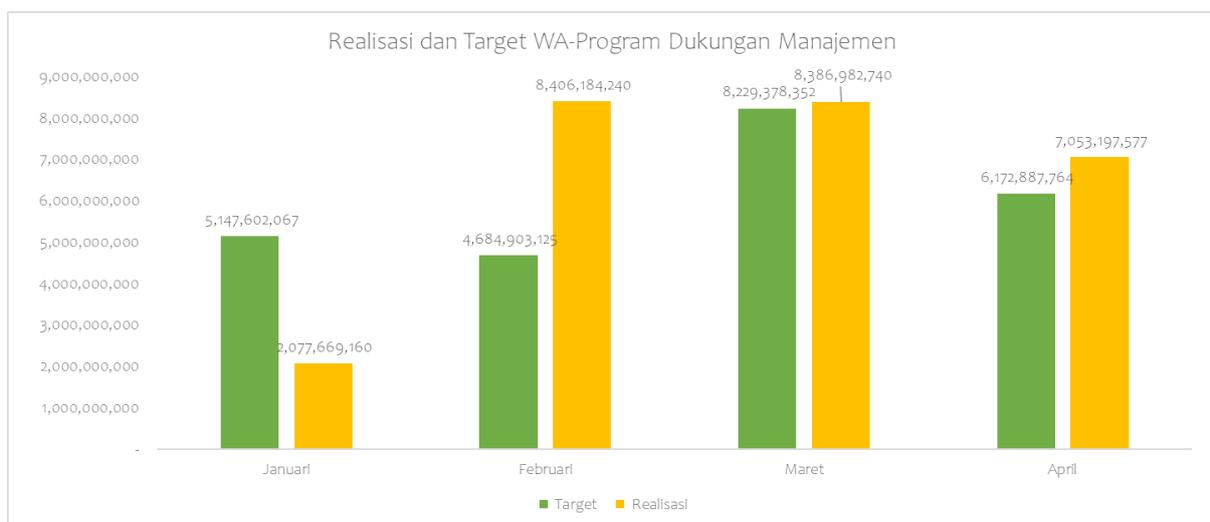
Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen		Target (5,67%)		Realisasi (SP2D)	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
<b>WA-Program Dukungan Manajemen</b>					
<b>6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional</b>		<b>6.172.887.764</b>			-
AEC-Kerja sama	Kerja Sama Bidang Pangan	46.790.927		15,881,658	
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	18.442.124		0	
	Layanan Hukum	38.947.096		23,350,474	
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	134.565.824		193,320,001	
	Layanan Protokoler	32.942.020		36,256,500	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	60.682.810		11,235,000	
	Layanan Umum	444.784.724		565,061,809	

	Layanan Perkantoran	4.463.129.045		4,793,044,602	
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	74.540.865		695,307,060	
.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	106.998.886		122,587,000	
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	302.197.979		52,238,136	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	43.770.857		900,000	
	Layanan Manajemen Keuangan	62.072.410		39,215,000	
	Layanan Audit Internal	131.965.660		315,671,105	
PAD-Peraturan Presiden	Rperpres tentang Rencana Pangan Nasional	15.352.893		6,730,000	
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pangan	183.279.552		178,755,260	
UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	12.579.093		3,643,972	

**Tabel 3. Realisasi Keuangan Bulan April Tahun 2025 Per Kegiatan Lingkup Badan Pangan Nasional**

Program dan Kegiatan	Target 5,67% (Rp)	Realisasi April (Rp)	% (Dari Target)
Badan Pangan Nasional	152.097.932.920	45,239,902,868	29,72%
HA-Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	146.088.099.167	38,186,705,291	26,14%
WA-Program Dukungan Manajemen	6.172.887.764	7,053,197,577	114,25%

Dari tabel 3 diatas, realisasi keuangan Program Dukungan Manajemen melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama Bulan April Tahun 2025 telah terealisasi sebesar **Rp. 7,053,197,577 (114,25%)** dari target sebesar **Rp. 6.172.887.764 (5,67%)**. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka target, realisasi dan PAGU WA-Program Dukungan Manajemen akan terlihat pada grafik berikut:



Gambar 1. Realisasi dan Target Sekretariat Utama Tahun 2025

### **3.2 Monitoring Kegiatan Prioritas**

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional, Kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat Utama pada periode bulan April Tahun 2025 telah ter-realisis anggaran sebesar **8,386,982,740** dengan prioritas kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

#### **Sekretaris Utama**

#### **9 April 2025 - Pemerintah Terus Genjot Penyerapan Gabah Beras Demi Perkuat Stok CBP**



PALEMBANG - Badan Pangan Nasional turut berupaya dalam optimalisasi penyerapan beras dalam negeri untuk memastikan stok cadangan beras pemerintah terpenuhi dalam kondisi aman dan stabil. Hal ini diungkapkan oleh Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Dr. Sarwo Edhy pada saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Kompleks Pergudangan Sukamaju Perum Bulog Kanwil Sumsel dan Babel, Palembang, Rabu (9/4/2025).

Sarwo menyebut jika penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram Gabah Kering Panen (GKP) merupakan salah satu wujud pemerintah hadir demi kesejahteraan petani.

“Saat ini petani merasakan manfaat dari kebijakan harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen (GKP) sebesar 6.500 per kilogram. Hal

ini merupakan bentuk kehadiran dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat khususnya petani sebagai produsen pangan,” kata Sarwo.

Lebih lanjut Sarwo mengatakan jika Badan Pangan Nasional memiliki kewenangan memberikan penugasan kepada Bulog untuk penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berfungsi menjaga stabilitas pasokan dan harga, mengantisipasi kekurangan pasokan, serta memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

“Upaya pemenuhan penyerapan gabah petani untuk CBP ini sejalan dengan semangat swasembada pangan yang diusung Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, penyerapan gabah petani untuk memperkuat stok CBP menjadi salah satu langkah konkret dalam keberpihakan kepada petani,” tegas Sarwo.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhammad Suyamto menegaskan saat ini stok beras nasional sebanyak 2,4 juta ton kemudian yang ada di Sumatera Selatan itu total 51.400 ton dari target sekitar 160.000 ton setara beras, sedangkan pengadaan yang dilakukan secara nasional telah mencapai 840 ribu ton setara beras dari target 3 juta ton setara beras “Bulog terus melakukan pengadaan beras dengan harga 12.000/kg atau dalam bentuk GKP dengan harga 6500, untuk menambah stok cadangan beras pemerintah dengan target 3 juta ton setara beras,” ungkapnya.

Lebih lanjut Suyamto mengungkapkan bahwa salah satu permasalahan pengadaan GKP ini adalah keterbatasan dryer sehingga pengadaan harus dikoordinasikan dengan mitra. “Jadi hambatan nya adalah terbatasnya dryer yang di miliki oleh Bulog, untuk itu harapan ke depan dapat dilakukan pengadaan dryer yang lebih memadai sehingga program penugasan kepada Perum Bulog untuk serap gabah bisa berjalan lebih lancar lagi,” ungkap nya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman mengapresiasi Bapanas, Bulog dan peran seluruh mitra yang telah melakukan upaya untuk menyerap hasil panen petani dengan maksimal ditengah segala kendala yang ada.

“Kami sudah berkunjung di beberapa daerah, saat ini petani berterima kasih atas keputusan Bapak Presiden menugaskan kepada Bulog untuk membeli harga gabah seharga 6.500 atau beras seharga 12.000,” ungkap Alex

Iapun memahami dengan anggaran yang disediakan pemerintah sehingga Bulog harus mengambil penyerapan dari komersil. Untuk itu harus ada solusi dengan serapan yang sedemikian besar maka akan muncul juga kendala terkait sarana dan prasarana misalnya biaya perawatan dan lain-lain. Berbagai kendala yang dihadapi ini menurutnya perlu disampaikan untuk mendapatkan solusi kebijakan permanen bagi kesejahteraan petani.

“Untuk itu kami sebagai mitra akan siap sedia untuk diskusi dan memberikan support penuh kepada Bulog, dan juga support dari Badan Pangan Nasional. Yang pasti jangan pernah mematikan harapan para petani yang sekarang sudah sangat riang gembira dengan harga pembelian 6.500/g dalam bentuk gabah,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa stok CBP yang memadai menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Stok CBP dapat dipergunakan pemerintah tatkala terjadi fluktuasi harga di pasar atau stimulus bantuan ke masyarakat berpendapatan rendah.

“Kecukupan stok beras yang ada di Bulog itulah yang menopang stabilitas pasokan dan harga pangan, sebab dengan stok yang ada dan cukup, dapat dilakukan berbagai intervensi stabilisasi pangan seperti penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan beras. Impaknya bisa kita lihat bahwa inflasi terjaga hingga hari ini,” kata Arief.

## **14 April 2025 - Dorong Pemerintah Daerah Susun Analisis SKPG, NFA : Sebagai Upaya Antisipasi Kerawanan Pangan**



Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis nasional yang menjadi pondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan kesehatan Masyarakat terutama didalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, gejolak geopolitik, dan fluktuasi harga pangan dunia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Sarwo Edhy saat membuka Sosialisasi dan Pengembangan Kapasitas dalam Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahun 2025 di Jakarta, Senin (14/4/2025).

Sarwo Edhy menegaskan bahwa Badan Pangan Nasional berkomitmen menjaga dan memperkuat tata kelola sistem pangan guna memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan aman. “Dalam upaya antisipasi kerawanan pangan, NFA melakukan berbagai langkah strategis, baik di tingkat pusat dan daerah melalui kegiatan kewaspadaan pangan yang terkoordinasi dengan berbagai pihak terkait” ucapnya.

“Kewaspadaan pangan di tingkat pusat dan daerah dilaksanakan melalui dua kegiatan prioritas utama, diantaranya yakni penyusunan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) secara periodik oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai salah satu alat/tools early warning system dalam menetapkan dasar kebijakan pangan” papar Sarwo.

Lebih lanjut, Sekretaris Utama NFA ini menyebutkan peran penting Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). “Sebagai instrumen strategis dalam mengantisipasi dan mengatasi potensi kerawanan pangan di berbagai daerah. SKPG dibangun berdasarkan hasil analisis menyeluruh dari tiga pilar utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan,” tuturnya.

Melalui pemanfaatan SKPG secara optimal, Badan Pangan Nasional menargetkan penurunan angka kerawanan pangan menjadi 11% pada tahun 2025, sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu Direktur Kewaspadaan Pangan NFA, Nita Yulianis menerangkan bahwa NFA mendorong pemerintah daerah untuk menyusun Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai konsekuensi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Upaya ini merupakan bagian penting dari peran strategis pemerintah daerah dalam mengantisipasi, mengidentifikasi, dan menangani potensi kerawanan pangan di wilayah masing-masing” ungkap Nita.

“Kami tetap mendorong daerah untuk terus aktif melaksanakan dan melaporkan SKPG meskipun tidak ada alokasi anggaran dekonsentrasi tahun ini, karena hasil analisis SKPG dapat dimanfaatkan dan sudah dilakukan untuk intervensi bantuan pangan” jelas Nita lebih lanjut.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi di tempat berbeda menyampaikan bahwa SKPG berfungsi sebagai sistem deteksi dini guna mengidentifikasi wilayah dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap kerawanan pangan. “Penyusunan SKPG ini sangat penting agar pemerintah daerah memiliki data dan informasi yang akurat untuk merancang intervensi kebijakan yang tepat sasaran,” tegas Arief.

Sosialisasi yang dilaksanakan secara hybrid dihadiri oleh 505 penanggung jawab dan petugas aplikasi SKPG dari dinas yang membidangi urusan pangan dari 16 Provinsi dan 273 Kab/Kota.

### **17 April 2025 - Sinergi Antar Lembaga untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Susun Rencana Pangan Nasional 2025-2029**



Jakarta, 17 April 2025 — Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional resmi memulai penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan Nasional Tahun 2025–2029 dengan membentuk Panitia Antar Kementerian dan/atau Non-Kementerian (PAK).

Proses ini ditandai dengan rapat perdana yang digelar hari ini di Kantor Badan Pangan Nasional, Jakarta, yang dihadiri oleh perwakilan 16 kementerian/lembaga terkait. Dokumen strategis ini akan menjadi peta jalan pembangunan pangan lima tahun ke depan, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

"Pangan adalah hak dasar rakyat yang harus dipenuhi negara. Penyusunan Rencana Pangan Nasional ini merupakan amanat UU Pangan, dan kami berharap seluruh anggota PAK dapat berkontribusi aktif agar proses ini selesai tepat waktu, yakni paling lambat Juni 2025," ujar Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, dalam sambutannya di hadapan peserta rapat.

Langkah awal penyusunan RPerpres ini didasari oleh Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025, dengan Badan Pangan Nasional sebagai pemrakarsa. Keberhasilan proses ini diharapkan dapat mendorong sinergi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.

Selain mengatur aspek-aspek strategis seperti ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, rancangan aturan ini juga akan memuat isu-isu baru seperti susut dan sisa pangan, mutu pangan, serta penguatan data dan informasi pangan. Penyusunan Rencana Pangan Nasional diharapkan memperkuat pilar kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Hukum, Surdiyanto, melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, menyampaikan dukungan terhadap proses penyusunan Perpres ini, namun juga memberikan catatan penting terkait aspek waktu dan kedalaman substansi. "Perpres ini tidak memiliki delegasi langsung dari undang-undang, sehingga penyusunannya harus benar-benar memperhatikan kepentingan dan kewenangan kementerian/lembaga terkait. Harmonisasi antar sektor sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih dan tarik-menarik saat tahap harmonisasi," ungkapnya.

Bapanas juga memaparkan draft struktur Perpres yang mencakup 5 bab: ketentuan umum, substansi RPN, pemantauan dan evaluasi, pendanaan, dan ketentuan penutup. Disertai lampiran berisi matriks indikator dan target pangan yang diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029

## 21 April 2025 - Penguatan Ketersediaan Pangan untuk Pemenuhan Pangan Antarwaktu dan Antarwilayah



JAKARTA – Dalam rangka memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat secara merata, baik antarwilayah maupun antarwaktu, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama para mitra. Upaya ini antara lain dilakukan melalui koordinasi peningkatan produksi pangan, penguatan kerja sama antardaerah (KAD), hingga optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Sekretaris Utama NFA Sarwo Edhy dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (21/4/2025) menegaskan bahwa ketahanan pangan yang tangguh harus dibangun secara kolaboratif dan berkelanjutan. “Ketersediaan pangan yang stabil tidak bisa hanya bertumpu pada satu daerah atau satu waktu produksi. Harus ada sinergi lintas wilayah dan penguatan sistem cadangan pangan yang adaptif terhadap perubahan,” ujarnya.

Untuk itu NFA mendorong daerah-daerah sentra produksi pangan untuk terus meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi, melalui dukungan teknologi pertanian, sarana dan prasarana pertanian, serta fasilitas distribusi pangan yang memadai. Kemitraan dengan petani dan pelaku usaha pangan juga terus diperkuat guna menjaga keberlanjutan pasokan pangan utama seperti beras, jagung, dan komoditas strategis lainnya.

Sebagai langkah konkret distribusi pangan yang merata, NFA memperkuat skema Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara daerah surplus dan daerah defisit pangan. Inisiatif ini tidak hanya untuk memastikan kelancaran pasokan, tetapi juga menjaga kestabilan harga dan menurunkan potensi gejolak pangan di daerah-daerah rentan.

Adapun penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan pengawasan untuk komoditas khusus seperti minyak goreng, gula konsumsi, dan bawang putih perlu dilakukan secara kolaboratif dan seksama untuk memastikan komoditas pangan dapat disalurkan dengan lancar kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan adanya beberapa temuan dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum akibat adanya tata kelola distribusi dari pelaku usaha yang tidak benar, sehingga komoditas pangan tidak sampai ke masyarakat, seperti ditimbun dan dioplos.

"Yang banyak sekarang masalah, di distribusi, jadi tata kelola distribusinya, pengawasannya. Jadi ada beberapa temuan dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, temuan adanya tata kelola yang tidak benar, distribusi. Akibatnya distribusinya tidak lancar ya minyak gorengnya tidak sampai ke pasar, tidak sampai ke masyarakat. Ada yang menimbun dan lain-lain, ada yang mengoplos," ujar Tito.

"Kaitan dengan Cadangan Pangan Pemerintah, memang kita sudah mempunyai peraturan presiden 125 Tahun 2022 tentang Cadangan pangan disebutkan bahwa Bulog dapat melakukan pengelolaan Cadangan Pangan untuk seluruh komoditas, ada 11 komoditas yang memang masuk di dalam Perpres 125 Tahun 2022, namun di sana disebutkan bahwa Bulog diutamakan pada cadangan beras, jagung, dan kedelai. Untuk komoditas lainnya itu ditugaskan pada BUMN lainnya yaitu RNI atau ID FOOD. Kami dari Badan Pangan Nasional sebetulnya sudah menugaskan baik untuk daging kerbau yang memang harganya fluktuatif maupun bawang putih kepada ID FOOD. Oleh karena itu nanti kami akan bawa ke rapat Menko

Pangan untuk hal ini sehingga fluktuasi untuk komoditas-komoditas impor itu akan stabil dari sisi pasokan dan harga pangan." jelas Sarwo.

Untuk mengurangi disparitas pasokan dan harga pangan antar daerah, NFA juga terus mendorong kerjasama antar daerah (KAD) sehingga pemenuhan kebutuhan pangan di daerah konsumen dapat tetap dipenuhi oleh wilayah produsen antara lain komoditas cabai, bawang merah, dan daging ruminansia terutama pada saat momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Dalam menjaga stabilisasi dan inflasi pangan. NFA juga telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), penyaluran beras SPHP, dan optimalisasi Cadangan Jagung Pemerintah dalam bentuk SPHP Jagung yang telah mencapai 14.641 ton pada bulan April 2025 dari total rencana 97.131 ton (15,7%). Upaya ini antara lain dilakukan untuk menyerap hasil panen jagung petani yang akan memasuki panen raya sekitar 1,4 sampai 1,8 juta ton, salah satunya di NTB. Dalam hal ini NFA juga telah menerbitkan Juknis dan ketentuan penyimpanan jagung pipilan kering dengan kadar air 14%, guna menjaga kualitas CJP.

"Cadangan Jagung Pemerintah ini dapat diberikan kepada para Peternak layer dan atau broiler mandiri, UMKM saat terjadi gejolak pasokan dan harga pangan. Jadi ini memang perlu segera diintervensi untuk mengantisipasi para peternak layer yang memang harganya saat ini turun." tambah Sarwo.

Upaya penguatan ketersediaan pangan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). "NFA saat ini tengah memperluas volume dalam cadangan pangan nasional serta mempercepat sistem digitalisasi pengelolaannya, CPP harus siap siaga kapan pun dan di mana pun, menjadi bantalan utama saat suplai terganggu," ujar Kepala NFA Arief Prastyo Adi di tempat berbeda.

## 21 April 2025 - NFA dan Pemprov Sumbar Perkuat Sinergi Wujudkan Swasembada Pangan



JAKARTA – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) guna membangun ketahanan dan kemandirian pangan berbasis potensi lokal. Hal ini menjadi salah satu fokus dalam kunjungan Gubernur Sumatera Barat beserta jajarannya yang berlangsung di Kantor NFA, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan kemandirian pangan. “Ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan dan keterjangkauan, tetapi juga soal kemandirian. Kami melihat Sumbar sebagai daerah yang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri dengan kekuatan lokalnya,” ujar Arief.

Ia menambahkan, NFA berkomitmen memperkuat kolaborasi pusat dan daerah, termasuk melalui penguatan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD), fasilitasi distribusi antardaerah, percepatan penganekaragaman konsumsi pangan lokal, serta pengawasan keamanan pangan berbasis laboratorium dan data.

“Sinergi ini adalah fondasi dalam membangun kedaulatan pangan daerah. Kami percaya, kekuatan pangan nasional dimulai dari kekuatan pangan lokal, untuk menuju asta cita kita bersama—swasembada pangan,” tegas Arief.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan bahwa sektor pangan dan pertanian menjadi salah satu prioritas utama dalam arah pembangunan daerahnya. “Sebanyak 51,7 persen penduduk kami menggantungkan hidup di sektor pertanian, dan 81 persen nagari berada di kawasan hutan. Ini merupakan potensi besar untuk membangun sistem pangan berbasis kekuatan lokal,” ungkap Mahyeldi.

Ia juga menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi daerahnya, antara lain dampak bencana alam terhadap produksi beberapa komoditas pangan seperti cabai, begitu juga beberapa komoditas pangan yang pemenuhannya masih membutuhkan suplai dari provinsi lain. Namun demikian, Ia optimis karena Sumbar juga memiliki keunggulan komparatif terkait produksi beberapa komoditas pangan seperti telur, ayam potong serta komoditas perikanan seperti tuna dan lobster.

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Sumbar turut mendorong perlunya regulasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dukungan pengembangan infrastruktur seperti cold storage, serta edukasi petani untuk beralih ke praktik pertanian organik. NFA menyambut baik berbagai inisiatif tersebut sebagai bagian dari strategi penguatan sistem pangan yang berkelanjutan dan tangguh.

## **22 April 2025 - Diversifikasi dan Keamanan Pangan Jadi Kunci Menuju Swasembada Pangan**



BEKASI – Ketahanan dan pertahanan negara bukan hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga ditopang oleh kekuatan pangan. Dalam visi pembangunan nasional, swasembada pangan menjadi salah satu pilar utama yang terus diperkuat, sejalan dengan Asta Cita kedua Presiden Prabowo Subianto.

“Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) melalui Kedeputian Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menjalankan mandat untuk mewujudkan swasembada pangan melalui strategi diversifikasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi sumber daya pangan,” ungkap Sekretaris Utama NFA, Sarwo Edhy, dalam Rapat Koordinasi Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan di Bekasi, Senin (22/4/2025).

Langkah strategis ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang diterjemahkan ke dalam dua indikator utama di tingkat NFA: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Indeks Keamanan Pangan Segar. Kedua indikator tersebut tidak hanya menyoroti ketersediaan, tetapi juga kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.

Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA, Andriko Noto Susanto, menyebutkan bahwa target skor PPH nasional tahun

2025 adalah 94,0. Untuk mencapainya, NFA akan terus menjalankan berbagai program seperti B2SA Goes to School dan Rumah Pangan B2SA, dengan pendekatan yang lebih adaptif melalui pemanfaatan dana nonfisik dan pengembangan pangan lokal berbasis potensi daerah.

“Implementasi ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 yang mendorong percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Jadi bukan sekadar memberi bantuan makan, tapi juga membentuk kesadaran masyarakat bahwa pangan lokal kita—Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)—tak kalah dari makanan ultra-olahan yang banyak beredar di pasaran,” jelas Andriko.

Penguatan program juga dilakukan melalui pengembangan Desa B2SA di 809 lokasi di 50 kabupaten pada 17 provinsi, serta dukungan

terhadap Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal (PUPPL) dan pelatihan teknis PPH, khususnya di wilayah tertinggal dan rentan seperti kawasan Indonesia Timur.

Lebih lanjut Andriko menekankan bahwa selain aspek konsumsi, keamanan pangan segar juga menjadi perhatian utama. Menurutnya, NFA secara

rutin melaksanakan sertifikasi dan registrasi pangan segar, serta investigasi dan penindakan terhadap pangan yang tidak memenuhi standar. Langkah ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama poin kedua: mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan, dan memperbaiki gizi melalui sistem pangan berkelanjutan.

Di lain sisi, kunci keberhasilan program pangan tidak bisa lepas dari kolaborasi antar lembaga. Agung Hendriadi, pakar di bidang pangan yang juga hadir pada pertemuan tersebut menekankan pentingnya sinergi antar Kementerian/Lembaga. “Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi krusial untuk memperkuat ketahanan pangan yang aman dan berkualitas,” ujar Agung.

Senada dengan itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi yang ditemui terpisah mengatakan, “Program-program kita tidak bisa dijalankansendiri. Dibutuhkan kerja sama dari hulu ke hilir—mulai dari edukasi, regulasi, hingga pengawasan di lapangan. Semua elemen harus bergerak bersama memaksimalkan potensi pangan lokal agar Indonesia benar-benar mandiri, tangguh, dan berdaulat dalam bidang pangan.” tutup Arief.

**22-24 April 2025 - Antisipasi Kerawanan Pangan, NFA Perkuat SDM Pemerintah Daerah Susun Analisis Sistem Peringatan Dini**



Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan merespons potensi kerawanan pangan di berbagai daerah, Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) terus mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah melalui pelatihan dan pendampingan penyusunan Analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG).

“Ketahanan pangan menjadi pondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat didalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, gejolak geopolitik, dan fluktuasi harga pangan dunia” ungkap Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Sarwo Edhy saat membuka Sosialisasi dan Pengembangan Kapasitas dalam Analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi

(SKPG) Tahun 2025 Wilayah Tengah dan Timur di Depok, Selasa dan Rabu (22-23/4/2025).

Sarwo Edhy menyebutkan bahwa Badan Pangan Nasional berkomitmen menjaga dan memperkuat ketahanan pangan sebagai isu strategis nasional. “Dalam upaya mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan, NFA melakukan langkah sinergi dengan berbagai pihak termasuk K/L terkait, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, swasta, asosiasi, dan akademisi” ucapnya.

“Pengembangan kapasitas teknis dalam penyusunan analisis SKPG di daerah baik provinsi maupun kab/kota sangat penting, karena merupakan ujung tombak upaya deteksi dini untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan” sambung Sarwo lebih lanjut.

“Jadi kami berharap dapat memanfaatkan waktu secara maksimal untuk belajar dan berdiskusi, memahami konsep dan penerapannya dengan baik, serta mampu menjadi laskar pencegah kerawanan pangan di wilayahnya masing-masing sehingga diperoleh manfaat yang optimal dalam mendukung keberhasilan kegiatan SKPG di masa depan, serta pemanfaatan SKPG diharapkan dapat dilakukan secara optimal,” lanjut Sekretaris Utama NFA.

Sementara itu Direktur Kewaspadaan Pangan NFA, Nita Yulianis menerangkan bahwa Pentingnya penyusunan SKPG sebagai tools Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi, SKPG harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota sesuai kewenangan masing-masing dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NFA mendorong pemerintah daerah untuk menyusun Analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai konsekuensi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Aplikasi ini dikembangkan untuk mempermudah akses data dan informasi bagi para pemangku kepentingan. Aplikasi terintegrasi ini memungkinkan pemerintah daerah dalam mengantisipasi, mengidentifikasi, dan menangani potensi kerawanan pangan di wilayahnya” jelas Nita.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi di tempat berbeda menyampaikan bahwa SKPG berfungsi sebagai sistem deteksi dini guna mengidentifikasi wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan. "Penyusunan SKPG ini sangat penting agar pemerintah daerah memiliki data dan informasi yang akurat untuk merancang intervensi kebijakan yang tepat sasaran," tegas Arief.

### **29 April 2025 - Inflasi Rendah dan Stok Beras Terjaga, Kepala Badan Pangan Nasional Optimis Indonesia Capai Swasembada Pangan**



JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa Indonesia berhasil mencatatkan inflasi tahunan pada 2024 merupakan yang terendah di dalam sejarah, yakni sebesar 1,57 persen.

Selain itu, ketersediaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 3,1 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, yang menandai keberhasilan penguatan ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Arief, usai menerima kunjungan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Eto Taku, di Kantor NFA, Jakarta pada Selasa (29/4/2025).

"Sejak tahun 1958, inflasi Indonesia berada pada titik terbaik, di 1,57 persen. Ini ditopang oleh ketersediaan beras yang juga terbaik dalam sejarah. Hari ini mencapai 3,1 juta ton," ungkap Arief.

Arief mengatakan bahwa peningkatan produksi pangan nasional terus diupayakan selaras dengan peningkatan kesejahteraan petani yang menjadi fokus Presiden Prabowo Subianto. “Bapak Prabowo sangat concern terhadap kesejahteraan petani. Kita ingin produksi naik, tapi juga petani sejahtera,” tambahnya.

Menurutnya, ketahanan pangan Indonesia harus bertumpu pada kemandirian dan kedaulatan pangan. Tiga pilar utama yang menjadi perhatian adalah ketersediaan (availability), keterjangkauan (affordability), dan kemudahan akses (accessibility). Namun, tujuan utama tetap pada pencapaian swasembada pangan.

Arief menyebut bahwa di tengah naiknya harga beras di sejumlah negara tetangga, Indonesia tetap stabil dengan harga pembelian gabah petani sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg) dan ketersediaan stok yang memadai.

“Dengan kerja keras kementerian teknis dan dukungan berbagai pihak, sampai Mei 2025 kita surplus 1,68 juta ton. Tapi ini harus dijaga. Jika kita tidak mempertahankan luas tanam 6,61 juta hektare, produksi bisa di bawah kebutuhan nasional yang rata-rata 2,5 sampai 2,6 juta ton per bulan,” jelasnya.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Sekretariat Utama pada periode bulan April 2025 sebagai berikut:

1. Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama adalah Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional sebesar Rp. 108,854,211,000,- dari total pagu Badan Pangan Nasional sebesar Rp. 2,684,182,221,000,- yang terdiri dari 6 Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan 15 Rincian Output (RO).
2. Realisasi keuangan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional pada bulan April 2025 mencapai Rp. 7,053,197,577 (114,25%) dari target sebesar 6.172.887.764 (5,67%)

#### **4.2 Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi di Sekretariat Utama adalah masih rendahnya realisasi anggaran pada beberapa MAK, bahkan ada yang masih 0 realisasinya pada awal tahun dikarenakan anggaran masih belum bisa digunakan pada saat awal tahun.

#### **4.3 Rekomendasi**

Tindak lanjut atas permasalahan di atas antara lain:

1. Penyelesaian dokumen pendukung sebagai syarat pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari alokasi ABT Badan Pangan Nasional Tahun 2025.
2. Penyiapan SDM yang akan menangani pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi untuk mendorong realisasi keuangan dapat mencapai target yang telah direncanakan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. DIPA Revisi 6 Tanggal 28 April 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**NOMOR : SP DIPA- 125.01.1.690590/2025**



03 4125 7004 0290 1645

**Revisi ke 06**  
Tanggal : 28 April 2025

**A. Dasar Hukum:**

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

**B. Dengan ini disahkan Abstrak Anggaran Uraian:**

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (135)	BADAN PANGGAN NASIONAL	
2. Unit Organisasi	: (01)	BADAN PANGGAN NASIONAL	
3. Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA	
4. Kode/Nama Sektar	: (690590)	BADAN PANGGAN NASIONAL	
Sesuai	: Rp.	2.801.268.025.000	( DUA TRILYUN DELAPAN RATUS SATU MILIAR DUA RATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan kegiatan sebagai berikut:

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi:

04 EKONOMI

04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan:

	Jumlah Uang
<b>Terlampir</b>	

**C. Sumber Dana Berasal Dari:**

1. Rupiah Murni	Rp.	2.801.268.025.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
6. SBDN PDS	Rp.	0		Rp.	0

**D. Penarikan dana dilakukan melalui:**

1. KPPN JAKARTA V (135) Rp. 2.801.268.025.000

**E. Pernyataan Isyarat dan Keterangan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjut dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dari Petikoran Penemuan yang tercantum dalam Halaman B DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggal jumbuh terhadap pengumpulan anggaran yang terbung dalam DIPA Petikan sepenuhnya berlaku pada Pengiran Anggaran/Revisi Pengiran Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan build-buld yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

BE  
SUHASIL NAZARA  
NP. 197011231999031000

